

Perkembangan Sengketa Keputusan Administrasi Negara Dalam Peradilan Administrasi Negara di Indonesia

INTISARI

Herman¹ Enny Nurbaningsih² Zainal Arifin Mochtar³

Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan keputusan dalam sengketa di peradilan administrasi negara. Perkembangan ini mengarah pada perluasan dan pergeseran kualifikasi keputusan administrasi negara. Keputusan yang disengketakan memperluas dan menggeser kualifikasi keputusan administrasi negara dalam ketentuan hukum positif dan doktrin. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah perkembangan kualifikasi keputusan administrasi negara di peradilan administrasi negara, pengaruh perkembangan terhadap hukum acara, dan akomodasi atas perkembangan sengketa keputusan di peradilan administrasi negara. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkembangan sengketa keputusan administrasi negara dalam peradilan administrasi negara, mengevaluasi implikasi dari perkembangan sengketa keputusan administrasi negara terhadap hukum acara di peradilan administrasi negara, dan menemukan perubahan ketentuan yang tepat dalam mengakomodasi perkembangan sengketa keputusan administrasi negara di peradilan administrasi negara. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan analisis utamanya adalah putusan hakim, ketentuan hukum positif, dan doktrin. Hasil analisis bahan utama dalam penelitian ini ditemukan hasil 1) perkembangan yang mengarah pada pertumbuhan, dan perubahan secara kualitatif kualifikasi keputusan. 2) implikasi perkembangan terhadap hukum acara. 3) mengakomodasi perkembangan kesesuaiannya dengan hukum positif. Rekomendasi penelitian ini menunjukkan diperlukan langkah pembentukan hukum oleh lembaga legislatif untuk mengatur secara komprehensif, dan kesesuaiannya satu sama lain antara perkembangan keputusan di peradilan dengan ketentuan hukum positif dan doktrin sebagai dasar berpijaknya.

Kata Kunci: Perkembangan sengketa keputusan, ketentuan hukum acara, akomodasi perkembangan dengan ketentuan hukum positif.

¹ Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Development of State Administration Decision Dispute In the State Administration Court in Indonesia

ABSTRACT

Herman¹ Enny Nurbaningsih² Zainal Arifin Mochtar³

The background of this research was the development of the decisions in the disputes in the state administration court. This development leads to an expansion and shift in the qualifications of state administration decisions. The disputed decisions expand and shift the qualifications of state administrative decisions in the provisions of positive law and doctrine. The main problem in this study was the development of state administrative decision qualifications in the state administration court, the effect of the development on procedural law, and the accommodation for the development of the decision disputes in the state administration court. The aims of this study were to analyze the development of the disputes in state administration decisions in the state administration court, to evaluate the implications of the development of disputes over state administration decisions on procedural law in the state administrative court, and to find the appropriate provision changes to accommodate the development of the disputes in state administration decisions in the state administration court. The type of legal research used in this study was normative legal research. The main analysis materials were the judge's decision, the provisions of positive law, and doctrine. The analysis results of the main materials in this study found the following results: 1) the developments lead to the growth and qualitative changes in decision qualifications; 2) the implications of the developments in procedural law; 3) accommodating the development of its conformity with positive law. The recommendations of this study indicate that it is necessary to take law making steps by the legislature to regulate comprehensively and its compatibility with each other between the development of decisions in the judiciary and the provisions of positive law and doctrine as the basis.

Keywords: Development of dispute decisions, provisions of procedural law, accommodation of developments with positive law provisions.

¹ Student of the Doctoral Program of Law Science, Faculty of Law, Gadjah Mada University.

² Professor of law at the Faculty of Law, Gadjah Mada University.

³ Lecturer at the Faculty of Law, Gadjah Mada University.